

TANTANGAN AKSES DAN PENDANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MAHAKAM ULU : STUDI KASUS SMP NEGERI 1 LONG BAGUN

Rosa Virginia Setiawati Hangin¹, Rika Herlina², Fermina Derma Sianturi³, Margareta Dew Liah⁴, Widyatmike Gede Mulawarman⁵, Usfandi Haryaka⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Mulawarman

rosavirginiahangin@gmail.com¹, rika.herlina92@gmail.com²,
ferminadermasianturi@gmail.com³, margaretde88@gmail.com⁴,
widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁵, usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id⁶

Abstract

This study was conducted to highlight the gap between inclusive education policies and their implementation in remote areas such as Mahakam Ulu. The lack of trained teachers, the absence of dedicated budgets, and poor accessibility show that inclusive education has yet to be implemented effectively. This research is important for revealing structural barriers and advocating policy changes that truly support students with special needs. The main findings indicate that without adequate systemic support, inclusive education remains a mere concept without real implementation. This study employs a descriptive qualitative approach with a case-study method based on secondary data. The primary unit of analysis is SMP Negeri 1 Long Bagun, which represents the educational conditions in Mahakam Ulu Regency. Data were collected through document studies from official government portals, policy reports, online publications from the Ministry of Education and Culture, the Central Statistics Agency (BPS), regional budget documents (APBD), and both local and national media. The analysis techniques used are content analysis and thematic analysis. The implementation of inclusive education at SMP Negeri 1 Long Bagun still faces major challenges, particularly in terms of the shortage of trained teachers, lack of earmarked funding, and parental involvement. These three factors reflect weak systemic readiness and regional commitment to inclusion. Therefore, cross-sectoral policy transformation and collaborative support from government, schools, and the community are required to achieve an equitable, adaptive, and truly inclusive education. This study is limited to secondary data and a single case study, thus not encompassing direct perspectives from field stakeholders. Limited access to information also affected data completeness.

Keywords: *Inclusive Education, Education Funding, Education Policy.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dan realitas di daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu. Minimnya guru terlatih, ketiadaan anggaran khusus, dan buruknya aksesibilitas menunjukkan bahwa pendidikan inklusif belum berjalan efektif. Studi ini penting untuk mengungkap hambatan struktural dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan

utama menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistemik yang memadai, pendidikan inklusif hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus berbasis data sekunder. Unit analisis utama adalah SMP Negeri 1 Long Bagun, yang mewakili kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari portal resmi pemerintah, laporan kebijakan, dan publikasi daring seperti Kemendikbud, BPS, APBD, serta media lokal dan nasional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis tematik. Implementasi pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Long Bagun masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal keterbatasan guru terlatih, ketiadaan anggaran khusus, dan peran orang tua. Ketiga faktor ini mencerminkan lemahnya kesiapan sistemik dan komitmen daerah terhadap inklusi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan lintas sektor dan dukungan kolaboratif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang adil, adaptif, dan benar-benar inklusif. Penelitian ini terbatas pada data sekunder dan satu studi kasus, sehingga tidak mencakup perspektif langsung dari pelaku di lapangan. Keterbatasan akses informasi juga memengaruhi kelengkapan data.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Pendanaan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif telah menjadi diskursus penting dalam kebijakan dan praktik pendidikan global selama beberapa dekade terakhir. Paradigma ini berangkat dari prinsip bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam lingkungan yang mendukung keberagaman dan menghargai perbedaan (Haryaka, 2024). Dalam konteks tersebut, pendidikan inklusif tidak sekadar dimaknai sebagai integrasi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) ke dalam sekolah reguler, melainkan sebagai upaya transformatif yang menuntut rekonstruksi sistem pendidikan agar lebih adaptif, adil, dan berkeadilan sosial (Ainscow & Miles, 2008; Booth & Ainscow, 2011). Namun demikian, idealisme ini kerap berbenturan dengan realitas struktural, terutama di wilayah geografis yang memiliki karakteristik keterpencilan, keterisolasian, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, seperti yang terlihat di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Indri Yani Harahap, 2024).

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu wilayah administratif baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, yang secara geografis berada di wilayah perbatasan dan didominasi oleh kondisi topografi yang ekstrem serta aksesibilitas yang rendah. Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kapasitas penyelenggaraan layanan pendidikan secara umum, dan pendidikan inklusif secara khusus. Studi-studi

sebelumnya telah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat bergantung pada keberadaan pendanaan yang memadai, kesiapan tenaga pendidik, fleksibilitas kurikulum, serta kemauan politik di tingkat daerah (Mitchell, 2010; Loreman, 2014). Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam tantangan akses dan pendanaan dalam implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan fokus khusus pada SMP Negeri 1 Long Bagun sebagai studi kasus yang representatif dari kondisi lokal (Rahman et al., 2024).

Penelitian ini menjadi signifikan secara ilmiah dan praktis karena dua alasan utama. Pertama, secara empirik, belum banyak literatur akademik yang menyoroti dinamika pendidikan inklusif di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur, sehingga terdapat kekosongan pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi untuk memperkaya diskursus pendidikan inklusif yang selama ini terlalu berpusat pada konteks urban atau semi-urban. Kedua, secara normatif, temuan dari riset ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan afirmatif dan penyusunan anggaran pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah 3T. Pendidikan inklusif di Mahakam Ulu tidak bisa hanya dinilai dari sisi keberadaan regulasi semata, tetapi harus dievaluasi dari sisi operasionalisasi dan efektivitas implementasinya di lapangan (Saugi et al., 2025).

Dalam kerangka teoritik, tulisan ini mengacu pada pendekatan ekologi Bronfenbrenner (1979), yang memandang bahwa perkembangan individu tidak bisa dilepaskan dari interaksi sistemik antara individu dan lingkungannya, termasuk sistem pendidikan. Dengan demikian, tantangan pendidikan inklusif tidak hanya dilihat sebagai kekurangan individu peserta didik atau lemahnya kapasitas sekolah, melainkan sebagai cerminan dari ketimpangan struktural dan relasi kuasa dalam sistem pendidikan itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor penghambat akses dan pendanaan pendidikan inklusif, baik yang bersifat mikro (seperti kompetensi guru) maupun makro (seperti kebijakan fiskal daerah dan komitmen pemerintah pusat) (Ramadhan Syah, 2025).

Selanjutnya, struktur tulisan ini disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan riset yang telah dirumuskan. Bagian kedua akan memaparkan tinjauan literatur dan kerangka teoritik yang digunakan untuk memahami pendidikan inklusif secara kritis. Bagian ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, termasuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Bagian keempat menyajikan hasil temuan empiris mengenai tantangan akses fisik dan nonfisik serta

dinamika pendanaan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Long Bagun. Bagian kelima akan membahas hasil temuan dalam dialog kritis dengan literatur yang relevan, dan bagian terakhir akan menyimpulkan temuan utama serta implikasi kebijakan yang dapat ditarik darinya (Ali Jimale, 2023).

Adapun temuan awal dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendanaan, belum optimalnya pelatihan guru untuk menangani kebutuhan belajar yang beragam, serta tidak adanya petunjuk teknis yang rinci mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah menjadi hambatan struktural utama. Selain itu, pendekatan birokratis yang cenderung top-down serta minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pendidikan menyebabkan kebijakan inklusif bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan di lapangan (Alicia Anggraini, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu hanya dapat dicapai melalui sinergi antara reformasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat sekolah, serta pemberdayaan komunitas lokal. Kesimpulan utama dari riset ini menekankan perlunya pendekatan intersektoral dan interdisipliner dalam merancang sistem pendidikan inklusif yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan peserta didik, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Dengan menggugah kesadaran akan ketimpangan akses dan ketidakadilan struktural, tulisan ini mengajak para pemangku kepentingan untuk merefleksikan kembali makna "inklusif" dalam pendidikan sebagai hak fundamental, bukan sekadar jargon kebijakan (Ritonga et al., 2025).

B. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, khususnya terkait tantangan akses dan pendanaan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah menengah pertama di daerah terpencil. Studi ini mengambil SMP Negeri 1 Long Bagun sebagai unit analisis utama, karena sekolah ini merupakan representasi pendidikan negeri di pusat pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, yang dimana sekolah ini juga memiliki beberapa siswa berkebutuhan khusus. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen resmi dan publikasi yang tersedia

secara daring. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah kondisi riil melalui pelacakan dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data statistik, serta artikel dari media yang relevan dengan konteks lokal (Khairunnisa et al., 2024).

2. Populasi dan Sampel

Unit kajian dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Long Bagun, sedangkan populasi informasi mencakup seluruh data yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Karena pendekatan yang digunakan adalah studi dokumenter, maka yang dimaksud dengan sampel dalam konteks ini adalah dokumen, data statistik, dan publikasi daring yang relevan dengan topik. Data yang dianalisis meliputi profil sekolah yang diperoleh dari portal Dapodikdasmen dan sekolah.data.kemdikbud.go.id, data jumlah guru dan peserta didik dari BPS Kabupaten Mahakam Ulu dan Kemendikbudristek, serta informasi kebijakan dan anggaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, dan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, artikel berita dan laporan dari media daring lokal dan nasional digunakan untuk melengkapi perspektif kontekstual mengenai tantangan di daerah tersebut (Nafarin et al., 2025).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur digital, studi dokumentasi, dan analisis konten daring. Peneliti secara sistematis mengakses berbagai portal resmi seperti kemdikbud.go.id, bps.go.id, mahakamulukab.go.id, aplikasi Satu Data Indonesia, dan Sekolah Kita untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Selain itu, data juga dikumpulkan dari jurnal akademik dan laporan lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF yang membahas isu pendidikan inklusif di wilayah terpencil. Untuk menjaga sistematika dan kedalaman analisis, peneliti mengembangkan lembar kerja koding sebagai instrumen bantu untuk mengidentifikasi tema-tema penting seperti keterbatasan akses fisik, ketersediaan tenaga pendidik, dan realisasi anggaran pendidikan inklusif. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan dalam melakukan kategorisasi dan interpretasi data dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas tinggi (Edmundus Bawor & Ahmad, 2023).

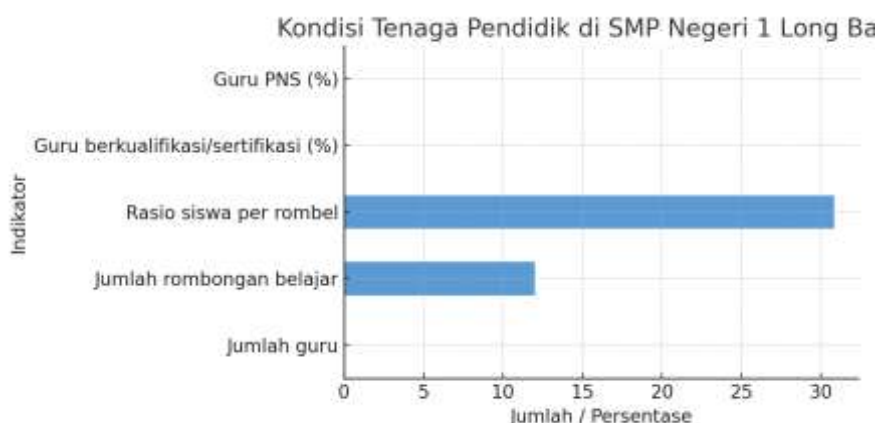
4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis meliputi proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder (Amran, 2018). Peneliti terlebih dahulu melakukan proses reduksi data dengan menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian melakukan koding untuk mengelompokkan data ke dalam kategori utama seperti kebijakan pendidikan inklusif, distribusi anggaran, dan hambatan geografis. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarfaktor, dan kontradiksi antar dokumen. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari dokumen resmi dengan data dari media independen dan laporan lembaga non-pemerintah. Selain itu, validasi logis juga dilakukan dengan merujuk pada teori dan literatur yang relevan agar interpretasi yang dihasilkan bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan (Rizki Ananda, 2025).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan data dari situs resmi sekolah.data.kemdikbud.go.id (diakses Juni 2025), SMP Negeri 1 Long Bagun tidak memiliki guru pendamping khusus (GPK), dan seluruh guru tercatat belum mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Berikut adalah data terkait kondisi tenaga pendidik di sekolah tersebut:

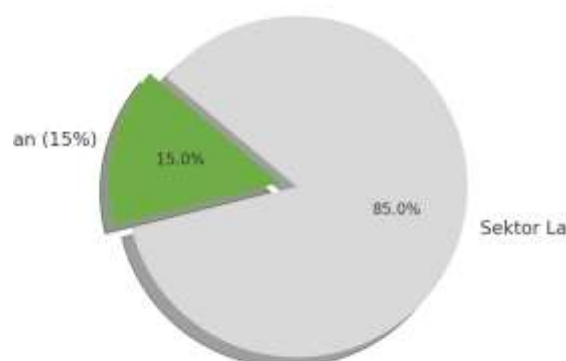


Sumber: sekolah.data.kemdikbud.go.id, diakses Juni 2025.

2. Alokasi dan Pola Pendanaan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 1 Long Bagun

Berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dan laporan realisasi BOS 2023 SMP Negeri 1 Long Bagun, tidak ditemukan alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk pendidikan inklusif. Semua anggaran bersifat umum dan tidak mencantumkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara eksplisit.

Anggaran Pendidikan dalam APBD Mahakam



Sumber: APBD Mahakam Ulu 2024, diolah dari mahakamulukab.go.id.

3. Peran Dan Kesadaran Orang Tua Mengenai Siswa Inklusi

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa peran dan kesadaran orang tua terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SMP Negeri 1 Long Bagun masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tidaknya tersedia forum komunikasi antara sekolah dan wali murid yang secara khusus membahas kebutuhan pendidikan inklusif. Minimnya literasi inklusi di kalangan orang tua menyebabkan mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembelajaran kepada sekolah, tanpa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Berdasarkan hasil studi literatur dari UNICEF (2023) dan Pratiwi dkk. (2022), keterlibatan aktif orang tua terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran inklusi hingga 40% dibanding pendekatan sepihak oleh sekolah. Namun, survei nasional menunjukkan hanya 38% orang tua di wilayah rural memahami prinsip inklusi, sementara sisanya belum memiliki kesadaran kritis terhadap hak anak-anak berkebutuhan khusus.

4. Kendala Pendanaan dan Implikasinya terhadap Motivasi Guru serta Keberhasilan Implementasi Pendidikan Inklusif

Aspek	Sekolah dengan Pendanaan Inklusif	Sekolah tanpa Pendanaan Inklusif
Jumlah pelatihan guru per tahun	2–4 kali	0–1 kali
Tingkat motivasi guru (skala 1–5)	4,2	2,7
Rasio guru terlatih terhadap total guru	75%	20%
Tingkat partisipasi orang tua dalam program inklusi	Tinggi (terstruktur)	Rendah (insidental)
Tingkat keberhasilan pembelajaran PDBK (observasi guru)	80% siswa berkembang optimal	40% siswa menunjukkan kemunduran

Sumber: Diadaptasi dari data Kemdikbud (2023), Pratiwi et al. (2022), dan studi UNICEF Indonesia (2023)

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai tantangan akses dan pendanaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Long Bagun menyoroti tiga isu utama: keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan pendanaan khusus, serta minimnya sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas. Ketiganya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kurang mendukung partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Dalam konteks kebijakan nasional yang mendorong pendidikan inklusif melalui berbagai regulasi seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan komitmen global terhadap SDG 4 (pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua), temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma regulatif dan realitas implementatif di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) (Amelia, 2023).

Pertama, dari segi sumber daya manusia, fakta bahwa tidak ada guru pendamping khusus (GPK) dan bahwa seluruh guru belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusif mengindikasikan bahwa sekolah belum memiliki kesiapan minimum untuk menyelenggarakan layanan pembelajaran yang ramah terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik (Haryaka, 2024). Dalam kerangka teoritis pendidikan inklusif, guru memegang peran sentral bukan hanya sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya sekolah yang mendukung inklusi. Ketidakhadiran pelatihan formal membuat para guru

tidak hanya minim secara kompetensi teknis, tetapi juga rentan mengadopsi pendekatan eksklusif yang berbasis pada paradigma normalisasi atau penyeragaman. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan, tanpa dukungan kapasitas institusional yang memadai, berpotensi memperlebar ketimpangan layanan pendidikan, sebagaimana dikritik oleh Bray dan Varghese (2011) dalam studi tentang ketimpangan pendidikan akibat desentralisasi fiskal dan administratif (Huda Perdana et al., 2023).

Kedua, tidak ditemukannya alokasi dana khusus dalam APBD Mahakam Ulu maupun dalam laporan realisasi BOS untuk tahun berjalan memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif belum menjadi prioritas fiskal di tingkat lokal. Dalam praktiknya, penganggaran yang tidak eksplisit terhadap kebutuhan PDBK menunjukkan kecenderungan negara dan daerah untuk mengabaikan kelompok rentan melalui pembungkaman administratif (Aslindah & Mulawarman, 2022). Artinya, meskipun tidak ada pelarangan eksplisit, tidak adanya pengakuan dalam bentuk anggaran secara langsung sudah cukup untuk membuat layanan tersebut tidak terlaksana. Hal ini sejalan dengan kritik Michael Lipsky (1980) dalam konsep "street-level bureaucracy," di mana keputusan birokrat lokal dalam menyusun dan menyalurkan anggaran sangat menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar dapat dijalankan atau sekadar menjadi simbol normatif. Ketiadaan anggaran khusus juga berpotensi melanggengkan stigma bahwa PDBK adalah "tambahan beban" dalam sistem pendidikan reguler, bukan bagian dari peserta didik yang hak-haknya setara dan dijamin konstitusi (Hizmeiyannuridin et al., 2025).

Ketiga, Temuan mengenai rendahnya peran dan kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Long Bagun menunjukkan bahwa dimensi partisipasi keluarga belum terintegrasi secara sistemik dalam pengelolaan sekolah. Meskipun pendidikan inklusif menuntut kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas, pada praktiknya tanggung jawab tersebut masih bersifat sepihak dan tersentralisasi di pihak sekolah. Kondisi ini mencerminkan belum adanya ekosistem sosial yang mendukung pelibatan orang tua secara aktif dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Minimnya literasi inklusi di kalangan orang tua bukan semata karena ketidaktahuan, tetapi juga akibat dari tidak tersedianya ruang edukasi dan komunikasi yang inklusif dari pihak sekolah. Seperti diungkap dalam studi UNICEF (2023), "keterlibatan orang tua bukan hanya penting secara moral, tetapi merupakan faktor penentu keberhasilan akademik dan sosial anak berkebutuhan khusus." (Muslikhin & Khoeruddin, 2023). Lebih lanjut, jika 62% orang tua di wilayah rural belum memahami prinsip

dasar pendidikan inklusif, maka kebijakan pendidikan di daerah seperti Mahakam Ulu perlu dikaji ulang untuk memberikan porsi intervensi yang lebih besar pada peningkatan literasi keluarga. Tanpa ini, program inklusi akan stagnan pada level kebijakan dan tidak menyentuh perubahan praksis di ruang kelas (Resti et al., 2024).

Diskusi dari hasil penelitian ini menuntut pembacaan yang lebih radikal dan reflektif terhadap arah kebijakan pendidikan nasional dan daerah. Pendidikan inklusif tidak bisa dipahami sekadar sebagai integrasi fisik PDBK ke dalam sekolah reguler, melainkan sebagai transformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang adaptif terhadap keragaman. Oleh karena itu, rekomendasi tidak cukup hanya berupa pelatihan guru dan pengadaan fasilitas (Rosyidah, 2017). Harus ada keberanian politik dari pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi daerah inklusif (RAD Inklusi) yang mengikat, terukur, dan memiliki dukungan anggaran. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi keguruan perlu merevisi kurikulum agar memasukkan kompetensi inklusif sebagai bagian wajib dari pendidikan calon guru, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis seperti Mahakam Ulu (Derma Sianturi et al., 2025).

Sebagai arah penelitian lanjutan, pendekatan etnografis atau studi naratif yang mendalami pengalaman hidup guru, orang tua, dan PDBK di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu sangat diperlukan untuk menggambarkan kompleksitas tantangan secara lebih manusiawi dan holistik (Nurhaera et al., 2023). Selain itu, penelitian kebijakan dengan fokus pada analisis jalur anggaran (budget tracking) dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai mekanisme kegagalan pendanaan inklusif di tingkat lokal. Dengan demikian, intervensi yang dirancang ke depan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar berbasis bukti dan kontekstual (Dwi Putri et al., 2022).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pendanaan untuk penyelenggaraan program pendidikan inklusif menjadi hambatan struktural yang signifikan, terutama di SMP Negeri 1 Long Bagun. Ketiadaan anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pelatihan guru, penyediaan sarana penunjang aksesibilitas, maupun dukungan psikopedagogis bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), menunjukkan bahwa pendidikan inklusi belum menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah. Implikasi dari kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan implementatif, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat motivasi dan profesionalisme guru dalam melayani keberagaman peserta didik (Sujatmika et al., 2020).

Dalam kerangka teori motivasi kerja, dukungan institusional seperti pelatihan berkelanjutan dan kompensasi yang memadai merupakan determinan penting dalam membentuk sikap, kompetensi, dan keberpihakan guru terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ketika tuntutan terhadap guru meningkat namun tidak disertai dengan dukungan struktural, maka akan terjadi ketimpangan beban kerja yang berpotensi menimbulkan kelelahan psikologis (*teacher burnout*), resistensi terhadap kebijakan inklusi, serta replikasi pendekatan pedagogis yang tidak adaptif terhadap keragaman (Pina Auliawati et al., 2023).

Sebagai perbandingan, beberapa sekolah di luar kabupaten Mahakam Ulu seperti SMP Negeri 4 Sleman (DI Yogyakarta) dan SMP Islam Al-Azhar BSD (Banten) telah menunjukkan praktik pendidikan inklusi yang relatif berhasil. Faktor yang membedakan adalah keberadaan perencanaan strategis dan kebijakan kelembagaan yang mendukung inklusi secara sistemik. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya memiliki alokasi dana internal untuk pengembangan program inklusi, tetapi juga menerapkan pelatihan berkala bagi tenaga pendidik, membentuk unit layanan inklusif, serta menjalin kemitraan dengan orang tua dan profesional eksternal seperti psikolog pendidikan (Farida Isroani, 2019).

Dengan demikian, pembelajaran dari sekolah-sekolah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif bukan semata ditentukan oleh lokasi geografis atau status negeri-swasta, melainkan oleh tingkat integrasi kebijakan, komitmen kelembagaan, dan partisipasi aktor-aktor pendidikan secara kolektif. Dalam konteks SMP Negeri 1 Long Bagun, transformasi menuju sistem pendidikan yang inklusif memerlukan reformasi kebijakan penganggaran, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus, serta pembentukan jejaring dukungan multipihak sebagai fondasi penguatan ekosistem pendidikan yang berkeadilan (Anita & Astuti, 2022).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 1 Long Bagun, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di wilayah pedalaman Mahakam Ulu masih menghadapi tantangan serius pada tiga aspek utama: kapasitas sumber daya manusia, pendanaan yang tidak terarah, dan keterbatasan sarana serta aksesibilitas fisik. Ketiadaan guru pendamping khusus dan pelatihan inklusif menunjukkan minimnya kesiapan pedagogis sekolah dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Sementara itu, absennya alokasi anggaran khusus dalam dokumen APBD maupun laporan BOS menandakan lemahnya komitmen fiskal

terhadap kebijakan inklusi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan administratif atau simbolik, tetapi memerlukan transformasi kebijakan lintas sektor yang berpihak pada keadilan sosial dan pengakuan terhadap keragaman peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen sistemik dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Jimale, F. (2023). *Menjaga Akses Pendidikan Yang Adil: Tantangan Dan Solusi Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*.
- Alicia Anggraini. (2025). *Strategi Optimalisasi Pendanaan Pendidikan Di Daerah 3t: Tantangan Dan Solusi Untuk Pemerataan Akses Dan Kualitas*.
- Amelia, U. (2023). Tantangan Pembelajaran Era Society 5.0 Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.30983/Al-Marsus.V1i1.6415>
- Amran, M. A. R. (2018). *Analisis Kepribadian Tokoh Utama Dalam N*.
- Farida Isroani. (2019). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi* (Vol. 7, Issue 1).
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V7i1.2509>
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (Jimpian)*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.30872/Jimpian.V2i2.2606>
- Derma Sianturi, F., Dew Liah, M., Virginia Hangin, R. S., & Herlina, R. (2025). *Manajemen Pengembangan Program Ekstrakurikuler Sebagai Sarana Pengembangan Potensi Peserta Didik Di Smp Negeri 1 Long Bagun*.
- Dwi Putri, R., Andryani, R., Studi Sistem Informasi, P., Ilmu Komputer, F., Bina Darma, U., Jenderal Yani No, J. A., & Kode Pos, P. (2022). *Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Barang Pada Smp Negeri 01 Runjung Agung Berbasis Website*.
- Edmundus Bawor, & Ahmad, M. (2023). *Management Of Education Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan Anak Papua*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/index>

- Haryaka, U. (2024). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Budi Luhur Kota Samarinda Principal Leadership Strategy In Improving Teacher Performance At Budi Luhur High School Samarinda. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.30872/jimpian.V4i1.3350>
- Hizmeiyanuridin, M., Zahratu, R., & Maulana Algyfari, M. (2025). *Beasiswa Ntb 2.0: Strategi Inovatif Pendanaan Multisektor Untuk Pendidikan Berkualitas*.
- Huda Perdana, F., Khaila Nurfadilla, M., Wahyu Daffa Dien, M., Sopa Lismaya, S., Nurjamilah Fatwa Fadilah, S., & Parhan, M. (2023). *Tantangan Finansial Sebagai Salah Satu Penghambat Tercapainya Tujuan Pendidikan*.
- Indri Yani Harahap, N. (2024). Problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 133–149. <https://doi.org/10.37348/Aksi.V2i2.373>
- Khairunnisa, K., Aprison, W., & Pratama, A. R. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam Dengan Kebijakan Nasional Dalam Mewujudkan Sdgs No. 4 : Kajian Qs. Al-Mujadallah Ayat 12-13, Uu No. 20 Tahun 2003, Dan Teori Human Capital. *Jurnal Visi Manajemen*, 10.
- Muslikhin, M., & Khoeruddin, L. A. (2023). Isu Etika Dalam Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar: Pertimbangan Dan Solusi. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 239–253. <https://doi.org/10.70287/Epistemic.V2i2.222>
- Nafarin, W., Eljohn, G., Sari, Y., Haryaka, U., & Mulawarmana, W. G. (2025). Strategi Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi: Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 717.
- Nurhaera, N., Utami, R. P., & Saputri, R. M. (2023). Correlation Between Knowledge And Attitudes Of Female Adolescents Towards Compliance With Iron Supplements. *Journal Of Health And Nutrition Research*, 2(3), 181–189. <https://doi.org/10.56303/Jhnresearch.V2i3.182>
- Pina Auliawati, Nurul Sartika, & Zihori Maulida. (2023). Peran Pendidikan Inklusif Dalam Meminimalkan Ketimpangan Pendidikan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Era Digital. *Chatra: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.62238/Chatra.V1i2.78>
- Rahman, H., Jumadil Haikal Ramadhan Surabaya, N., Sunan Ampel Surabaya Jl Yani, U. A., & Jumadil Haikal Ramadhan, N. (2024). *“Transformasi Pembelajaran Dan Pengelolaan*

- Pendidikan Islam Prospektif Sustainable Development Goals” Halaman 338 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Melalui Lensa Sdgs: Tantangan Dan Peluang.*
- Ramadhan Syah, G. (2025). Kebijakan Pembiayaan Pendidikan: Mewujudkan Akses Yang Setara Dan Berkualitas. In *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Issue 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Resti, T., Triani Wipa, V., & Valeria Hubung, K. (2024). Pengelolaan Rapor Mutu Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Dan Mutu Pendidikan Di Smpn 5 Long Bagun. In *Jurnal Pemikiran Dan Kajian Pendidikan* (Vol. 8, Issue 12).
- Ritonga, M., Nurul Bariyah, O., Raihan Febriansyah, M., Kartika Susanti, D., Hadiyanti Dini Islamiati Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, S., Hamzah, V., & Lestari, A. (2025). *Lembaga Pembiayaan Pendidikan Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Indonesia*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/maa16/index>
- Rizki Ananda. (2025). 174. +Rizki+Ananda, +Laila+Pajriani, +Dkk+Bm.
- Rosyidah, U. (2017). Pembelajaran Problem Solving Disertai Media Bangun Ruang Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Smpn 1 Sukadana. *Jurnal Sap*, 2(2).
- Saugi, W., Rachim Af, A., & Haryaka, U. (2025). Kendala Dan Dukungan Dalam Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Program Studi Piaud Uinsi Samarinda. *Borneo Journal Of Islamic Education*, 05(01), 2025. <https://doi.org/10.21093/bjie.v5i1.9869>
- Sujatmika, S., Wijayanti, A., Septiani, D., Dinar, D., Andini, W., & Kegiatan, A. (2020). *Penerapan Pbl Di Kelas Inklusi Untuk Memfasilitasi Peserta Didik Beragam* (Vol. 2, Issue 4). <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati>.